



UNPAD
Universitas
Padjadjaran

RISK MANAGEMENT IN DISRUPTION ERA

UNPAD's Experience

Prof. Dr. Rina Indiastuti. SE, MSIE.

From West Java for Indonesia to the World through SDGs

www.unpad.ac.id



Latar belakang

Dalam lingkungan Perguruan Tinggi Negeri - Berbadan Hukum (PTN - BH) yang semakin kompetitif dengan perubahan dinamis serta perkembangan teknologi yang mendistrupsi maka pengelolaan risiko merupakan kebutuhan yang harus disikapi organisasi untuk mengantisipasi dampak negatif yang dapat terjadi di masa yang akan datang.





Latar belakang

- PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), terdapat 5 (lima) unsur utama SPIP - termasuk Penilaian Risiko sebagai satu kesatuan terintegrasi dalam SPIP, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan pengendalian





Latar belakang

- Pimpinan Instansi, dalam hal ini termasuk Pimpinan Entitas, wajib melakukan penilaian risiko, terdiri atas : **(1) identifikasi risiko**, dan **(2) analisis risiko**, yang harus dikaitkan dengan pencapaian tujuan pada level entitas maupun level aktivitas.





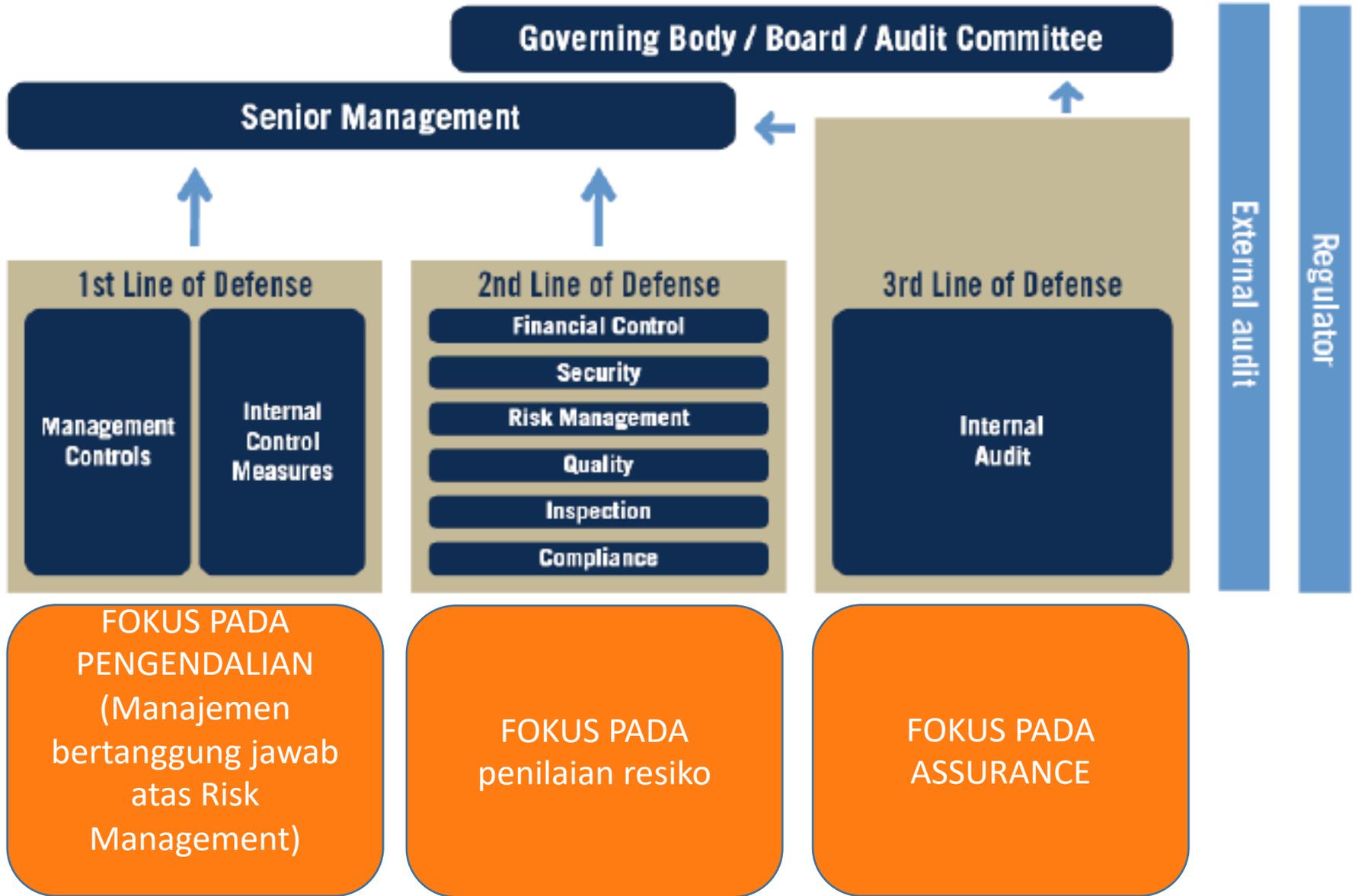
Mengapa mengelola Resiko

- Risiko : Ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau peristiwa akan mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya.





THREE LINES OF DEFENSE





RISIKO UNPAD

AKADEMIK

- Risiko Kinerja
- Risiko Reputasi

KEUANGAN

- Risiko Likuiditas
- Risiko kerugian PTNBH

TATA KELOLA

- Risiko hukum
- Risiko kepatuhan
- Risiko Pelaporan
- Risiko Pelayanan

Matriks Analisis RESIKO



			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	17	10	6	3	1
	4	Sering Terjadi	20	13	8	4	2
	3	Kadang Terjadi	22	15	11	7	5
	2	Jarang Terjadi	24	19	14	12	9
	1	Hampir Tidak Terjadi	25	23	21	18	16

LEVEL KEMUNGKINAN	KRITERIA KEMUNGKINAN
Hampir Tidak Terjadi (1)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun) ➤ Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari volume transaksi dalam 1 periode.
Jarang Terjadi (2)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d. 10 kali dalam 5 tahun). ➤ Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d. 10% dari volume transaksi dalam 1 periode.
Kadang Terjadi (3)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d. 18 kali dalam 5 tahun). ➤ Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d. 20% dari volume transaksi dalam 1 periode.
Sering Terjadi (4)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d. 26 kali dalam 5 tahun). ➤ Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d. 50% dari volume transaksi dalam 1 periode.
Hampir Pasti Terjadi (5)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 tahun). ➤ Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi dalam 1 periode.

Level Dampak	Area Dampak						
	Kerugian PTNBH	Reputasi	Kinerja	Operasional	Hukum	Likuiditas	Kepatuhan
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian negara kurang dari 10 juta rupiah.	Keluhan stakeholder secara langsung lisan/ tertulis ke organisasi jumlahnya < 3 dalam satu tahun	Pencapaian target kinerja $\geq 100\%$	Pelayanan tertunda ≤ 1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 2 kali dalam satu periode	Kemampuan pembayaran kewajiban untuk jangka waktu 9-12 bulan dalam satu tahun	Temuan Auditor terkait kepatuhan peraturan dan perundang – undangan < 5 dalam satu periode
Minor (2)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp 10 Juta s.d. 50 Juta	Keluhan stakeholder secara lisan/ tertulis	Pencapaian target kinerja di atas 80 %	Pelayanan tertunda diatas 1 sd 5 hari	Jumlah tuntutan hukum diatas 4 sd 10 dalam satu periode	Kemampuan pembayaran kewajiban untuk jangka waktu 6 – 9 bulan dalam satu tahun	Temuan Auditor terkait kepatuhan peraturan dan perundang – undangan antara 5 s/d 10 dalam satu periode

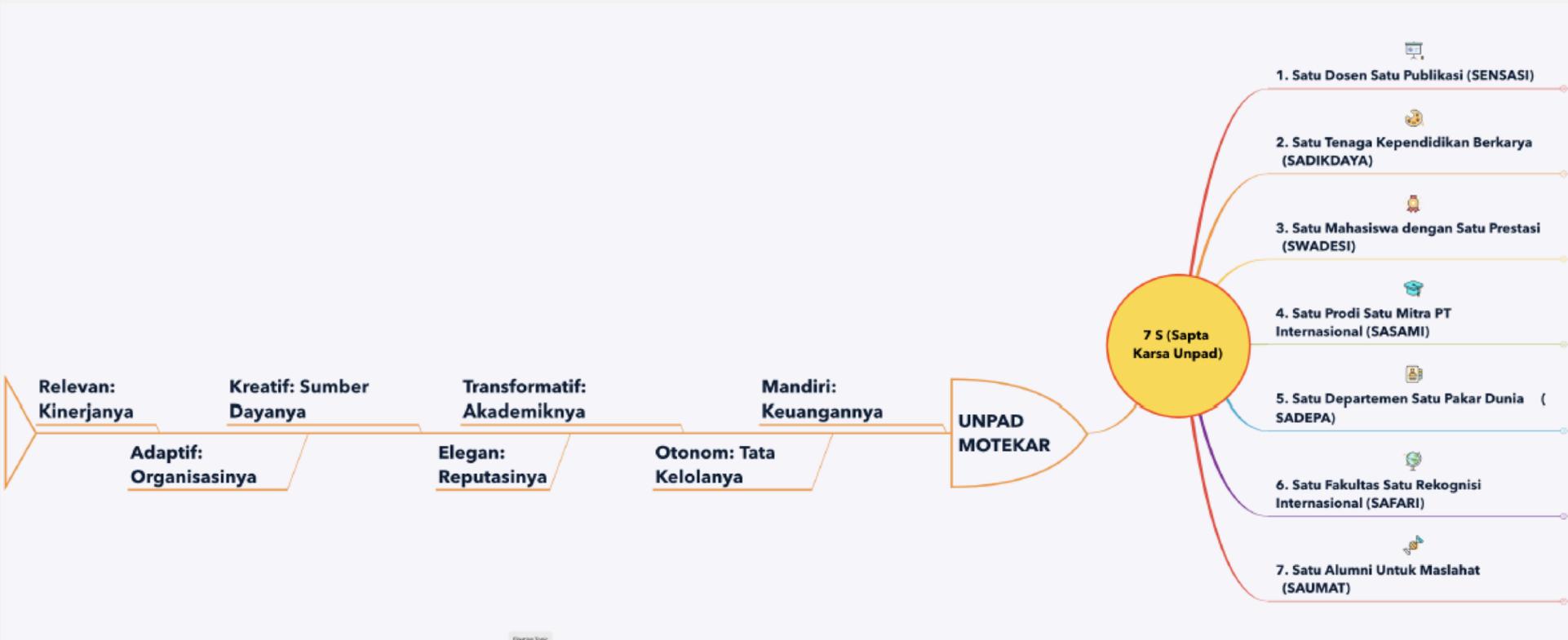
Level Dampak	Area Dampak						
	Kerugian PTNBH	Reputasi	Kinerja	Operasional	Hukum	Likuiditas	Kepatuhan
Moderat (3)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp 50 Juta s.d. 100 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal	target kinerja di atas 50% s.d. 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari sd 15 hari	Jumlah tuntutan hukum diatas 4 s.d 10 kali dalam satu period	Kemampuan pembayaran kewajiban untuk jangka waktu 3 –6 bulan dalam satu tahun	Temuan Auditor terkait kepatuhan peraturan dan perundang – undangan antara 11 s/d 15 dalam satu periode
Signifikan (4)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp 100 Juta s.d. 500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	target kinerja di atas 25% s.d. 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d. 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 10 s.d. 15 kali dalam satu periode	Kemampuan pembayaran kewajiban untuk jangka waktu 1 – 3 bulan dalam satu tahun	Temuan Auditor terkait kepatuhan peraturan dan perundang – undangan antara 16 s/d 20 dalam satu periode



Level Dampak	Area Dampak						
	Kerugian PTNBH	Reputasi	Kinerja	Operasional	Hukum	Likuiditas	Kepatuhan
Sangat signifikan (5)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp 500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja < 25 %	Pelayanan tertunda < 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 15 kali dalam satu periode.	Kemampuan pembayaran kewajiban untuk jangka waktu < 1 bulan dalam satu tahun	Temuan Auditor terkait kepatuhan peraturan dan perundang – undangan diatas 20 satu periode



SAPTA KARSA UNPAD

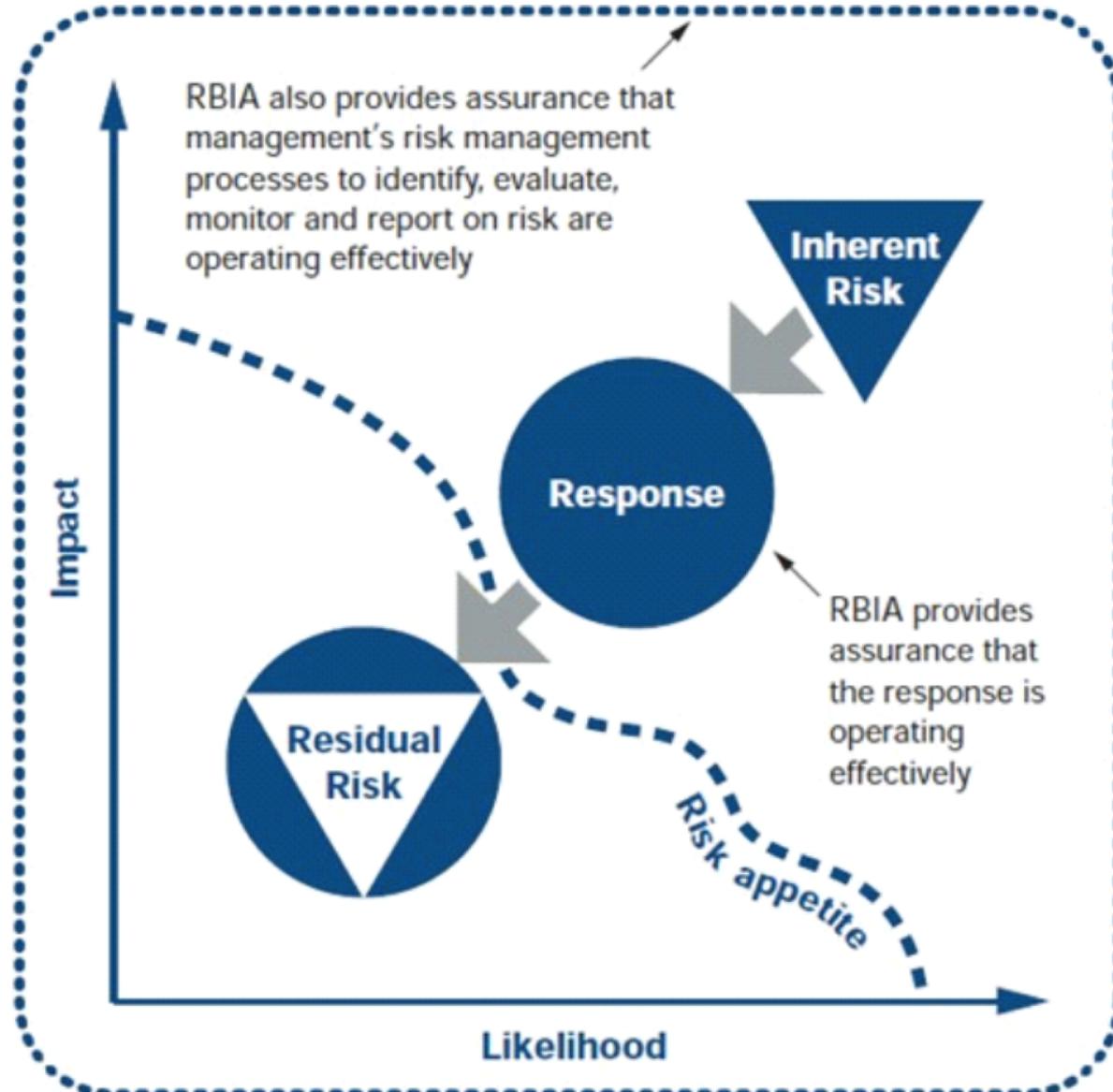




UNPAD MOTEKAR

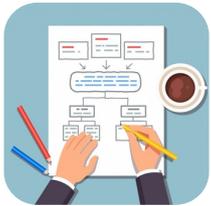


RISK BASED INTERNAL AUDIT





Risk Based Audit



RENCANA AUDIT: Pengembangan dalam konsultasi dengan aktivitas atau pemimpin unit



AUDIT PROGRAMS : perubahan fokus dari pengujian secara detail terhadap pekerjaan menjadi berfokus kepada aktivitas



Audit Procedures and technique: dirancang untuk memperbaiki aktivitas.

ASSURANCE & CONSULTING

Risiko yang menjadi perhatian di masa depan



Cybersecurity

- Serangan siber dapat merusak reputasi organisasi
- Organisasi menyiapkan diri mengelola ancaman siber yang dapat menyebabkan disrupsi

Data protection

- Stakeholder meminta Perlindungan memadai terhadap data

Talent Management

- kemajuan menantang organisasi / UNPAD untuk mengelola SDM yang tepat dalam pencapaian tujuan.

Sustainability

- Organisasi / UNPAD perlu memiliki kemampuan dalam mengelola isu keberlanjutan jangka panjang.



**A ship is safe in harbor, but
that's not what ships are for.**

William G.T. Shedd



UNPAD
Universitas
Padjadjaran



HATUR NUHUN

Jln. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang 45363 Jawa Barat